Indonesian Journal of Public Administration Review Volume: 1, Nomor 1, 2023, *Hal*: 1-9

Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Supriyono[1], Edhi Siswanto[2*]

[1,2] Universitas Muhammadiyah Jember; supric123@gmail.com, edhisiswanto@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Konsep "desa digital" mengacu pada penggunaan TIK untuk mendorong transformasi digital di tingkat desa atau perkampungan. Tujuannya adalah untuk menggunakan teknologi untuk memberikan akses, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Program Desa Digital meningkatkan pelayanan publik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Kepala desa, perangkat desa, dan pihak masyarakat adalah lima informan penelitian. Teori George Edward III tentang implementasi kebijakan adalah yang saya gunakan. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas meminimalkan kesalahan karena tidak ada bias dalam penyampaian informasi. Tujuan dan sasaran implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo sudah sangat jelas sehingga dapat membentuk konsistensi dalam membangun dan mengembangkan program dari tahun 2021 hingga tahun berjalan 2023. Kedua, sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program desa digital sudah tersedia karena ada staf dan seluruh pelaksana yang kompeten yang dapat menyelesaikan masalah secara optimal. Ketiga, kerangka kerja untuk menerapkan program desa digital di Desa Sidomulyo masih terbatas pada pemerintah desa dan tim Media Centre, sehingga kurang memahami pelaksanaannya. Keempat, struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan program desa digital di Desa Sidomulyo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan dan pelaksanaan prosedur operasi standar (SOP) dalam setiap program yang akan dijalankan. Akibatnya, proses ini belum mencapai hasil yang maksimal.

Katakunci: Implementasi kebijakan, Desa Digital, Pelayanan Publik

DOI: https://doi.org/10.47134/par.v1i1.1935
*Correspondensi: Edhi Siswanto
Email: edhisiswanto@unmuhjember.ac.id

Received: 07-09-2023
Accepted: 15-10-2023
Published: 28-11-2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The concept of "digital village" refers to the use of ICT to drive digital transformation at the village or township level. The goal is to use technology to provide access, improve quality of life, and strengthen community empowerment in rural areas. The aim of this research is to explain and analyze how the implementation of the Digital Village Program policy improves public services in Sidomulyo Village, Silo District, Jember Regency. This research was conducted using a qualitative methodology combined with a descriptive approach. Observations, interviews and documentation were used to collect data. The village head, village officials and the community were the five research informants. George Edward III's theory of policy implementation is the one I use. First, the research results show that clear communication minimizes errors because there is no bias in conveying information. The aims and objectives of implementing the digital village program in Sidomulyo Village are very clear so that consistency can be created in building and developing the program from 2021 to 2023. Second, the resources needed to run the digital village program are already available because there are staff and all implementers who competent who can solve problems optimally. Third, the framework for implementing the digital village program in Sidomulyo Village is still limited to the village government and the Media Center team, so there is a lack of understanding of its implementation. Fourth, the bureaucratic structure involved in implementing the digital village program*

in Sidomulyo Village. This is caused by the lack of implementation and implementation of standard operating procedures (SOP) in each program that will be implemented. As a result, this process has not achieved maximum results.

Keywords: *Policy implementation, Digital Village, Public Services*

Pendahuluan

Semua aspek kehidupan berkembang dari waktu ke waktu termasuk ekonimi budaya, social, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Industri teknologi informasi mengalami perkembangan tercepat saat ini. Wikipedia menyatakan bahwa teknologi informasi terdiri dari dua komponen, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Istilah "teknologi informasi" mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, instrumen, manipulasi dan pengelolaan data, sedangkan "teknologi komunikasi" mengacu pada penggunaan perangkat untuk memproses dan mentransfer data antar perangkat. Oleh karena itu, istilah “teknologi informasi” dan “teknologi komunikasi” tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, TIK mengacu pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, modifikasi, pengelolaan, dan pengiriman data antar media. Pada saaat ini, perkembangan TIK dari anak kecil hingga orang dewasa tidak dapat dihindarkan. Sampai semua orang mengetahui teknologi TIK dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Teknologi membuat pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari jauh lebih mudah, sekaligus memberikan hiburan serbaguna bagi mereka yang menginginkannya. Perkembangan TIK kini juga telah merambah sektor pemerintahan Indonesia. Mulai dari pendataan hingga pengabdian masyarakat. Kepala daerah hingga kepala desa dituntut harus membuat perubahan dalam pengelolaan pemerintahan dengan mengikuti perkembangan teknologi hingga saat ini. Karena penggunaan TIK dapat pengelolaan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakatm dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. TIK bermanfaat untuk pengelolaan administrasi, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik membutuhkan waktu tunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk perawatan, namun kini berkat penerapan TIK, pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Teknologi yang saat ini diadopsi oleh negara khususnya di wilayah pedesaan adalah Desa Digital. Digikylä ini membuat layanan komunitas desa menjadi lebih efisien dan fleksibel. Artinya, masyarakat yang mengurus dokumen catatan sipil, dengan adanya Desa Digital masyarakat tanpa harus datang ke kantor desa, cukup dengan satu handphone. Namun, saat ini masih ada masyarakat desa yang masih awam dengan adanya teknologi. Dan masyarakat juga belum paham cara kerja Desa Digital itu seperti apa. Apalagi anak-anak sekolah dasar yang memiliki karakter senang bermain. Pelayanan Publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah ruang yang pada dasarnya dibutuhkan di setiap negara yang pernah ada. Istilah ini dapat merujuk pada seseorang yang meminta layanan, seseorang yang memberikan bantuan terhadap orang lain yang membutuhkan, atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi tertentu dan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Orang yang harus dianggap sebagai pemimpin adalah perdana menteri, yang pada saat itu tidak hanya bertugas memimpin dirinya sendiri, tetapi juga memimpin warga negara dengan memastikan bahwa setiap potensi keharmonisan sosial dapat diwujudkan di semua bidang

kegiatan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar prosedur pelayanan publik menetapkan standar pelayanan publik yang tinggi. Untuk meningkatkan standar ini, kebijakan ini diperlukan. Namun, proses ini tidak akan berjalan secepat yang seharusnya jika mesin tidak bekerja seefisien mungkin untuk mengoptimalkannya. Proses ini harus dilakukan secara konsisten dengan mempertimbangkan apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat umum dan membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih mudah. Orang-orang di negara mana pun memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi. informasi dan komunikasi yang berkembang, program Desa Digital pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi di daerah pedesaan. Platform desa digital akan berkonsentrasi pada berbagai kebutuhan informasi, layanan, dan ekonomi. Pemerintah menganjurkan agar desa menjadi digital. Tetapi keberadaan internet tidak serta merta menciptakan desa digital karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum itu terjadi. Kebijakan dasar, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2/a, dan Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa pasal 11 ayat 1–5, semuanya berkontribusi pada konsep desa digital. Peraturan Desa Sidomulyo No. 05 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital, Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa "Desa Digital" adalah gagasan yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk menggunakan teknologi yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan organisasi yang teratur.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang mana data didapatkan dan diolah serta dilaporkan secara deskriptif kualitatif.

Populasi, Sampel, Sampling

Populasi dalam penelitian ini melibatkan kepala desa Sidomulyo, perangkat desa yang bertanggung jawab atas Desa Digital, dan anggota komunitas desa Sidomulyo masing-masing dua orang.. Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni teknik Purposive Sampling yang mana dalam teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu saat penentuan sampel.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara dengan model wawancara tertulis dan terbuka.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan di BAB IV ini, peneliti akan membahas tentang implementasi kebijakan program desa digital dengan menggunakan konsep imploementasi kebijakan yang dikemukakan dari George C. Edward III (dalam Subarsono, 2022).

A. Komunikasi

Implementasi program desa digital yang dilakukan di Desa Sidomulyo, akan berjalan maksimal apabila tujuan kebijakan dipahami oleh implementator. Sangat penting bahwa berbagai informasi tentang ukuran dasar dan tujuan komunikasi sehingga pelaksana dapat memahami tujuan kebijakan yang ditetapkan. Adanya sumber informasi yang memiliki perbedaan dapat memicu pemahaman yang berbeda pula karena komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Sehingga nantinya implementasi dapat berjalan secara efektif, perlu adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan harus mengetahui apakah mereka kompeten dalam menjalankan tugas tersebut. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan kebijakan harus dipahami dan diterima oleh seluruh tim pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perihal komunikasi dalam implementasinya peneliti menggunakan dua indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi program desa digital yang dilakukan di Desa Sidomulyo yaitu :

a. Kejelasan Informasi *(Clarity)*

   Informasi yang diberikan terhadap pelaksana kebijakan harus jelas, tidak membingungkan, atau ambigu. Dalam implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo ini yang berwenang sebagai pembuatan dan pelaksana program adalah pemerintah Desa Sidomulyo sendiri terutama Kepala Desa sebagai konseptor dalam setiap program yang akan dijadikan peraturan desa (Pedes), sehingga minim terjadi salah tafsir dalam penyampaian informasi.

b. Tujuan dan Sasaran *(Target Group)*

   Pemerintah dalam upaya implementasi kebijakan program desa digital haruslah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas guna dapat menjalankan seluruh program secara maksimal. Apabila tujuan dari seluruh program yang dirancang jelas serta memiliki pengukuran yang sesuai untuk tingkat keberhasilan program diharapkan dapat terlaksana pada sasaran yang telah ditentukan. Desa Sidomulyo tentu memiliki tujuan dan sasaran tertentu dalam implementasi program desa digital yang utama adalah untuk memudahkan pela-yanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik di bidang perekonomian, pariwisata, serta seluruh layanan yang berkaitan dengan pemerintah desa, memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan pihak pemerintah desa seperti akses informasi data maupun layanan kritis, saran, dan pengaduan. Tujuan lainnya adalah sebagai upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui pem-anfaatan teknologi dengan promosi pariwisata daerah setempat dan layanan pengembangan UMKM. Sedangkan sasaran pada implementasi program desa digital terfokus pada masyarakat desa setempat dan masyarakat secara luas yang berpotensi sebagai pengunjung atau wisatawan untuk peningkatan perekonomian dari sumber pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh bahwa tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan desa digital sudah jelas sehingga dapat membantu kelengkapan informasi dalam komunikasi pihak internal pemerintah desa dan tim pelaksana.

B. Sumber Daya

Berdasarkan kutipan dari Ge0rge C. Edward III (1980) mengenai sumber daya, peneliti menjabarkan berhasil atau tidaknya dalam 4 (empat) indikator, yaitu:

1) Jumlah dan Kemampuan Staff

Perangkat desa adalah sumber utama dalam pelaksanaan program desa digital. Ketidak berhasilan sering terjadi dalam pelaksanaan program karena perangkat desa tidak memadai atau tidak kompeten dalam bidangnya.

Desa Sidomulyo tidak kekurangan staff, staff pengelola seperti teknisi, operator ataupun manajemen telah cukup piawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegagalan yang dapat terjadi karena kurangnya jumlah staff ataupun kurang kompetennya tim pelaksana nihil adanya. Peneliti berpendapat bahwa sistem keamanan yang berbasis internet akan dapat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Hacking sejauh ini yang tidak pernah terjadi pada imple-mentasi kebijakan program desa digital di Desa Sidomulyo, peneliti berasumsi bahwa tidak ada kekurang staff ataupun kurangnya kompetensi tim pelaksana karena segala permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan optimal.

2) Informasi Pelaksana Kebijakan

Informasi tentang pelaksanaan kebijakan datang dalam dua bentuk: informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan data tentang kepatuhan pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Peneliti berpendapat bahwa terdapat kekurangan informasi dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo. Dengan tidak adanya regulasi yang ditetapkan maka terdapat permasalahan dan tantangan yang akan terjadi seperti:

a. Tidak adanya standar yang ditetapkan

Tidak adanya regulasi yang secara resmi ditetatapkan oleh pemerintah desa dapat menyebabkan tidak adanya standar (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan desa digital. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengukuran tingkat keberhasilan program dan mempersulit proses monitoring ataupun evaluasi yang harus dilakukan.

b. Kurangnya perlindungan data

Tanpa adanya regulasi yang kuat, data pribadi ataupun dat penting lainnya yang dimiliki masyarakat dan telah dikumpulkan oleh program desa digital mungkin tidak dapat terlindungi secara optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan keamanan data.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa Sidomulyo atau bahkan pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengeluarkan regulasi yang jelas dan terperinci khususnya mengenai program desa digital sehingga

program tersebut dapat diimplementasikan lebih efektif, konsisten, dan transparan. Adanya regulasi yang diterapkan juga diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan data probadi yang mereka miliki, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan pemerintah yang men-jalankannya.

3) Kewenangan Implementator

Dalam menjalankan suatu program pada umumnya kesenangan harus bersifat formal agar suatu perintah atau instruksi dapat dapat dijalankan secara efektif. Pemerintah Desa Sidomulyo berwenang untuk membuat dan menetapkan regulasi serta standar tentang penggunaan teknologi dalam implementasi kebijakan program desa digital, namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya tuntas dikarenakan lemahnya regulasi yang ada di Desa Sidomulyo.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, peneliti menemukan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh im-plementator belum dijalankan secara optimal karena dalam implementasi kebijakan program desa digital terdapat lemahnya regulasi yang ditetapkan sehingga dapat menjadi penghambat. Seluruh kebijakan program dapat terlaksana dengan baik apabila ada regulasi atau instruksi yang jelas atas konsep program yang akan dijalankan sehingga di harapkan dalam perkembangannya pemerintah mampu menjalankan kewenangannya sebagai inplementator untuk membuat kebijakan yang mampu meningkatkan kesuksesan program.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementator memiliki staf pelaksana yang mencukupi dan berpengalaman, implementasi program tidak akan berhasil atau berhasil jika tidak ada fasilitas pendukung. Sesuatu dengan hasil observasi yang telah dilakukan, penelitian melihat bahwa fasilitas fisik yang yang menunjang jalannya program desa digital di Desa Sidomulyo cukup lengkap dengan adanya jaringan akses internet, adanya fasilitas komputer dan perangkat lunak, adanya jaringan informasi, adanya jaringan komunikasi, dan infrastruktur teknologi lainnya.

C. Disposisi

Jika implementator program digital memiliki kecenderungan untuk mendukung implementasi, maka implementasi kebijakan program desa digital akan lebih mungkin berjalan dengan apa yang di rencanakan dan di tetapkan sejak awal. Sebaliknya, jika tim pelaksana atau implementator memiliki sikap yang negatif atau penolakan terhadap implementasi kebijakan karena adanya konflik kepentingan, implementasi kebijakan program desa digital akan lebih mungkin berjalan sesuai dengan rencana. Peneliti berfokus pada disposisi untuk menerapkan kebijakan program desa digital melalui tiga indikator, yaitu :

1. Pemahaman Pelaksanaan
2. Arahan dan Tanggapan Pelaksanaan
3. Intensitas Respon atau Tanggapan Pelaksana

D. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan program desa digital yang kompleks membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Ketika sistem birokrasi yang ada tidak mendukung pelaksanaan kebijakan, ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dan menghambat pelaksanaannya. Ge0rge C. Edward III (1980) menyatakan bahwa ciri utama birokrasi adalah Standar Prosedur Operasional (SOP). Dengan menggunakan SOP selama menjalankan seluruh rangkaian program, para pelaksana diharapkan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan mengatasi masalah yang muncul selama program berlangsung. Pada penelitian terdapat temuan peneliti mengenai SOP. ditemukan hambatan dalam implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember karena tidak adanya SOP yang diterapkan dalam melancarkan jalannya program. Kebijakan program akan berjalan lebih baik apabila dapat menerapkan dan memberlakukan SOP disamping beracuan pada peraturan desa yang telah ada.

Simpulan

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa kebijakan desa digital di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember belum diterapkan secara optimal karena beberapa kekurangan:

a. Komunikasi

   Kamonikasi di dalamnya menggunakan indikator yang digunakan sebagai titik kunci keberhasilan komunikasi yaitu seberapa jelas informasi, tujuan dan sasaran. Pada kejelasan informasi tidak terdapat bias sehingga penyampaian informasi dapat diterima dengan baik sehingga memperkecil potensi kesalahan. Dalam tujuan dan sasaran implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo sudah sangat jelas sehingga dapat membentuk konsistensi dalam membangun dan mengembangkan program desa digital dari tahun 2021 hingga tahun berjalan 2023.

b. Sumber Daya

   Sumber daya di dalamnya menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sumber daya yaitu jumlah dan kemampuan staff, informasi dalam pelaksanaan kebijakan, kewenangan im-plementator, dan Fasilitas. Pada implementasi program desa digital sudah baik karena tidak kekurangan staff dan seluruh pelaksana yang kompeten yang dapat dilihat dari dapat diselesaikannya setiap permasalahan yang terjadi secara optimal. Pada informasi pelaksanaan kebijakan belum dapat dilakukan secara maksimal karena terdapat regulasi yang jelas dan terperinci mengenai program desa digital. Pada kewenangan implementator belum dijalankan secara optimal karena dalam implementasi kebijakan program desa digital terdapat lemahnya regulasi yang ditetapkan sehingga dapat menjadi penghambat. Sedangkan pada fasilitas sudah dapat dipenuhi dengan baik yang dapat dilihat dari adanya fasilitas komputer dan perangkat lunak, adanya jaringan informasi, adanya jaringan komunikasi, dan infrastruktur teknologi lainnya.

c. Disposisi

Disposisi didalamnya menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan sumber daya yaitu pemahaman pelaksanaan, arahan dan tanggapan pelaksanaan, serta intensitas respon. Dalam im-plementasi program desa Digital di Desa Sidomulyo mengenai pemahaman pelaksanaan belum optimal karena masih terbatas hanya pada pemerintah desa dan tim pelaksana saja. Sedangkan pada tanggapan pelaksana adanya program desa digital sudah baik karena sesuai dengan harapan implementator untuk dapat memberikan kemudahan dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Dalam intensitas respon yang diberikan oleh sumber daya yang dimiliki juga telah berjalan dengan baik sehingga setiap program dapat dapat dijalankan dengan cepat dan tuntas.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi didalamnya menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan sumber daya yaitu standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo dalam struktur birokrasi belum dapat terlaksana dengan maksimal karena masih ditemukan hambatan dalam implementasinya yang disebabkan oleh tidak adanya penerapan dan pemberlakuan SOP dalam setiap program yang akan dijalankan.

Daftar Pustaka

Agus Surpiyanto dan Kharis Fadlullah H. (2020), Strategi Pengembangan Desa Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM

Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.

Andi N., Jupriyadi, Arief B., Donaya P., Syaiful A., Rio A., dan Zahrina A. (2022), Digitalisasi Pelayanan Administrasi Surat Pada Desa Bandarsari.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yogyakarta.

Daniel A. Mazmanian, P. A. S. (1983). Implementation and Public Policy. Haper Collins.

Deby Febriyan E., Galih W. Pradana, Dan Yuyun E. K.S. (2019) Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital

Dewi Suryani, Hari Akbar Sugiantoro, dan Zahra Arwaning Tyas (2019), Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman

Donald P. Warwick, Theodore Reed, dan M. M. (1979). A Theory of Public Bureaucracy: Politics, Personality, and Organization in the State Department. Harvard University Press.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elex Media Erlangga

George C. Edward III. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). Politic and Policy Implementation In the Third World. Princeton University Press.

Gunn, H. and. (2003). Kebijakan Publik. Balai Pustaka.

Hamidi, 2004, "Metode Penelitian Kualitatif-Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal & Laporan Penelitian", Malang: UMM Press, hal. 9-10.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Ni Nyoman Pujaningsih, I. G. A. A. D. S. P. (2020). Penerapan Kebijakan.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Miles, B. Mathew dan M

Nawawi, Hadari & Hadari, Martini. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital

Peraturan Desa No. 05 Tahun 2020, Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital

Rahmat Suyatna (2019), Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. ALFABETA.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik:AIPI